




**DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor SOP	800 / /DP3AP2KB/X /2020
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 <b>Irr. HUSNANIATY NURDIN, MM</b> Nip: 19630203 198603 2 009
Nama SOP	Rekonsiliasi APBD

**SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT**

**Dasar Hukum**



1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018

Keterkaitan		Kualifikasi Pelaksana
1	SOP yang ada kaitannya dengan SOP lembaga lain.	1. Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, trampil dan inovatif.
2	SOP internal dan administratif	2. Pendidikan serendah-rendahnya D III jurusan ekonomi/akutansi

Peringatan		Peralatan/Perlengkapan
Hambatan dapat saja terjadi:		1. Alat tulis kantor
1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan tugas.	2. Komputer/laptop dan printer
2	Jika SOP dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	3. Lemari Arsip

**Pencatatan dan Pendataan: -**

N O	URAIAN AKTIFITAS	UNIT PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KASDA	PPK	BHR	KA.DP3 AP2KB	PERSYA RATAN	WAKTU	OUTPUT
1	Bendahara Pengeluaran mengecek SPJ setiap akhir bulan untuk dibuat Berita Acara Rekonsiliasi.			□		SPJ, Data, Aturan	20"	Konsep/ Dokumen
2	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dibuat oleh Bendahara Pengeluaran rangkap 2 dilengkapi dengan lampiran SPJ Pengeluaran dan Penerimaan setiap bulannya kemudian diserahkan ke PPK.			↓		SPJ, Data, Aturan	10"	Konsep/ Dokumen
3	PPK memeriksa BAR, apabila sudah sesuai diserahkan ke Kepala SKPD untuk ditandatangani		□			SPJ, Data, Aturan	20"	Disposisi Dan Dokumen
4	Kepala SKPD memeriksa kembali dan menandatangani BAR kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.			◇		SPJ, Data, Aturan	20"	Disposisi Dan DOK
5	Bendahara Pengeluaran mengirim BAR beserta kelengkapannya			□		SPJ, Data, Aturan	10"	Konsep/

	dikirim ke KASDA untuk diperiksa.							Dokumen
6	KASDA memeriksa BAR apabila sudah sesuai kemudian ditandatangani dan diserahkan kembali rangkap 2 ke bendahara Pengeluaran.					SPJ, Data, Aturan	1 hari	Disposisi Dan Dokumen
7	Bendahara Pengeluaran menyimpan BAR sebagai dasar kelengkapan Laporan Keuangan.					SPJ, Data, Aturan	10"	Konsep/ Dokumen

1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
2	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
3	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
4	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
5	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
6	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
7	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
8	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
9	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
10	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
11	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
12	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
13	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
14	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
15	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
16	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
17	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
18	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
19	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
20	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
21	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
22	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
23	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
24	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
25	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
26	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
27	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
28	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
29	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
30	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
31	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
32	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
33	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
34	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
35	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
36	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
37	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
38	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
39	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
40	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
41	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
42	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
43	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
44	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
45	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
46	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
47	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
48	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
49	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							
50	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota							